

LAPORAN

**PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAUBAU
TRIWULAN I TAHUN 2025**



**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
BAB II	4
PENGUMPULAN DATA SKM	4
2.1 Pelaksana SKM	4
2.2 Metode Pengumpulan Data	4
2.3 Lokasi Pengumpulan Data	5
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM	5
2.5 Penentuan Jumlah Responden	6
BAB III	7
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	7
3.1 Jumlah Responden SKM	7
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)	9
BAB IV	10
ANALISIS HASIL SKM	10
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan	10
4.2 Rencana Tindak Lanjut	11
4.3 Tren Nilai SKM	12
BAB V	13
KESIMPULAN	13
LAMPIRAN	14
1. Kuesioner Online	14
2. Hasil Pengolahan Data SKM	15
3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM	15
4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamankan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Baubau sebagai salah satu Unit Pelayanan Publik (UPP) di Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Baubau . Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik; dan
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan; dan
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada UPP BPPMHKP dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Baubau adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 (sebagaimana terlampir).

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner *online* melalui link <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/63> yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Baubau yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan melalui link kuesioner yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik per-triwulan dengan jangka waktu (periode) yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 4 (empat) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Januari 2025	8
2.	Pengumpulan Data	Januari-Maret 2025	60
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	April 2025	7

4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	April 2025	7
----	--------------------------------	------------	---

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Baubau periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan triwulan IV tahun 2024, maka populasi penerima layanan pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Baubau dalam kurun waktu triwulan IV tahun 2024 adalah sebanyak 22 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 19 orang.

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 21 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	20	95%
		Perempuan	1	5%
2	Usia	<25	0	0%
		25-45	13	62%
		46-60	8	38%
		>60	0	0%
3	Pendidikan	SD	1	5%
		SMP	0	0%
		SMA	18	86%
		D3	0	0%
		S1	2	10%
		S2	0	0%
		S3	0	0%
4	Pekerjaan	ASN	0	0%
		TNI/POLRI	0	0%
		Pelaku Usaha KKP	16	76%
		Pegawai Swasta	1	5%
		Wirusaha Non KKP	4	19%
		Pelajar/Mahasiswa	0	0%
5	Jenis Layanan	Uji Profisiensi bagi laboratorium pengujian penyakit ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan	0	0%
		Penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif	0	0%

		Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air	0	0%
		Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)	3	14%
		Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik	18	86%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik	0	0%

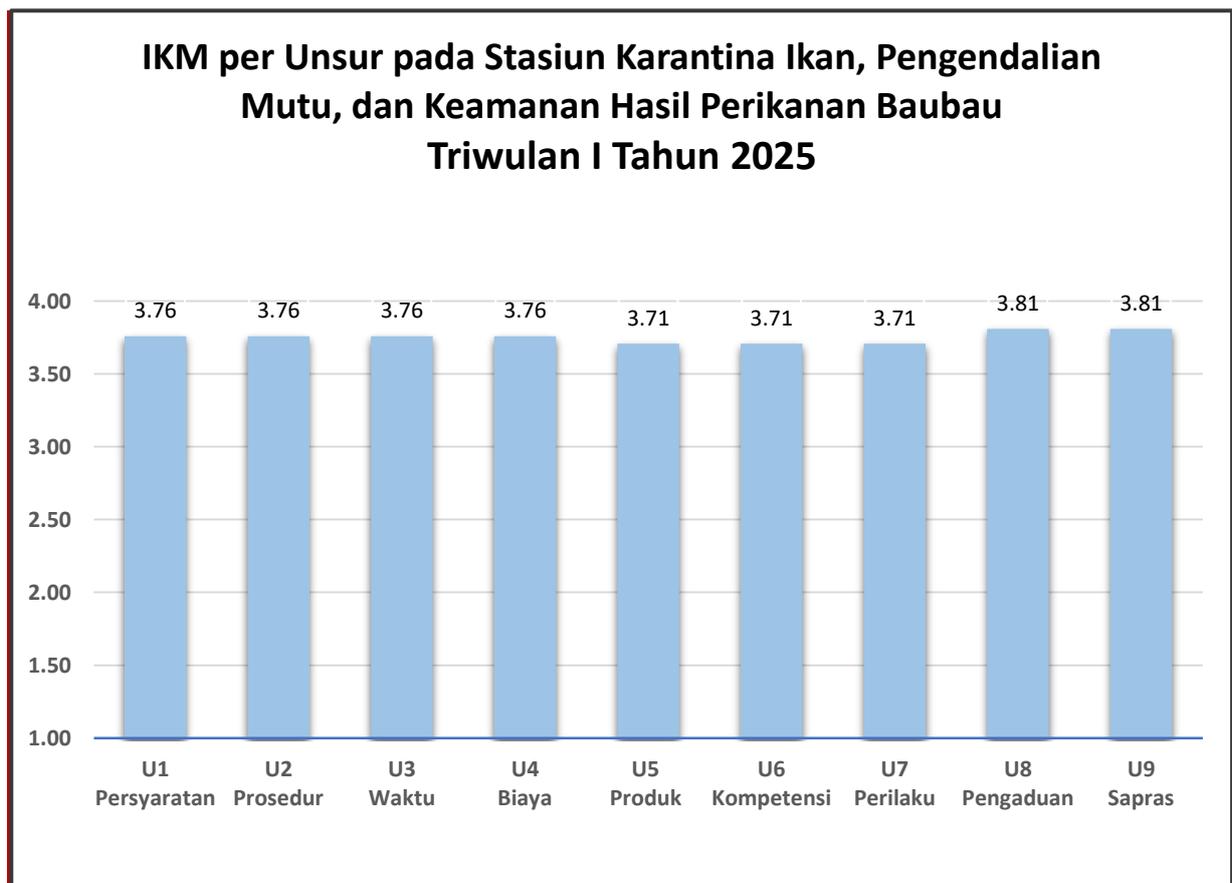
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3.76	3.76	3.76	3.76	3.71	3.71	3.71	3.81	3.81
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	93,92 (A atau Sangat Baik)								

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Tiga unsur layanan terendah yang didapatkan ialah Produk spesifikasi jenis pelayanan, Kompetensi Pelayanan dan perilaku pelaksana yang masing-masing mendapatkan nilai 3,71 .
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Penanganan Pengaduan, Sarana dan Prasarana mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,81 serta Biaya/Tarif mendapatkan nilai 3,76.
3. Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui link kuesioner pengisian SKM Online yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :
 - “Pelayanan sudah cukup baik dan lebih di tingkatkan lagi”
 - “Semoga kedepan bisa lebih baik lagi”.
 - “Tingkatkan terus pelayanan yang baik”.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Kompetensi pelayanan perlu ditingkatkan lagi dengan mengikuti berbagai pelatihan terkait pelayanan publik.
- Produk spesifikasi jenis layanan sudah ditampilkan di ruang pelayanan dan media sosial namun pengguna jasa cenderung bertanya secara langsung kepada petugas pelayanan.
- Perilaku pelaksana dalam memberikan pendampingan terkait penggunaan fitur layanan harus lebih ditingkatkan lagi.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

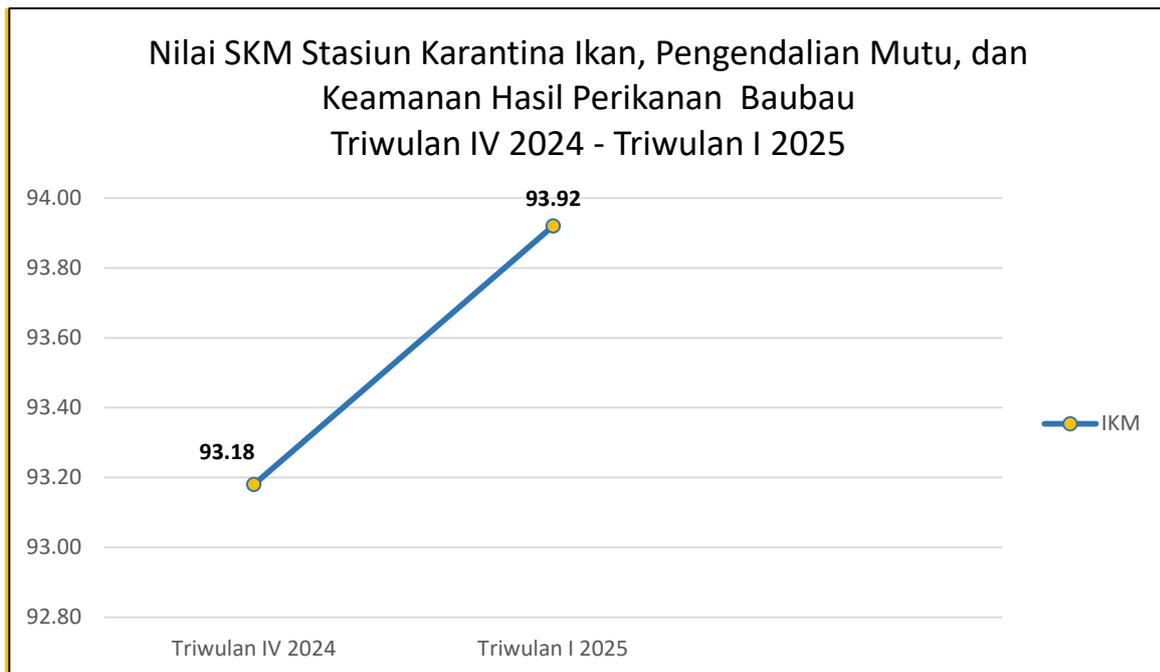
Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui rapat/diskusi tim pelayanan publik dengan pimpinan serta briefing kepada seluruh pegawai (petugas layanan). Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu (Triwulan II 2025)			Penanggung Jawab
			April	Mei	Juni	
1	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Melakukan pendampingan kepada pengguna jasa terkait produk spesifikasi jenis pelayanan		√		Tim Pelayanan Publik
2	Kompetensi Pelayanan	Melakukan refreshment pelatihan pelayanan publik bagi petugas pelayanan	√			Tim Pelayanan Publik
3	Perilaku Pelaksana	Melakukan asistensi penggunaan aplikasi layanan (SIAPMUTU, OSS,dll) di ruang pelayanan		√		Tim Pelayanan Publik

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan

survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Baubau dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari periode triwulan IV 2024 hingga triwulan I 2025 pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Baubau.

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode Triwulan I mulai Januari hingga Maret 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Baubau secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 93,92. Kemudian nilai SKM Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Baubau menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari triwulan IV 2024 hingga triwulan I 2025.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelayanan dan Perilaku pelaksana.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu penanganan pengaduan, Sarana dan Prasarana serta biaya/tarif.

Baubau, 08 April 2025

Kepala SKIPM Baubau



Yuni Irawati Wijaya, S.Pi, M.P
NIP. 196906091998032002

LAMPIRAN

1. Kuesioner Online

Survey Kepuasan Masyarakat
Unit : Stasiun KIPM Bau-Bau

Data Layanan

Risk Layanan

- Pengiriman Pemakaian Program Manajemen Mutu, Terpadu/terkait Aspek and Critical Control Point (PMMT/MAZCP)
- Pengiriman kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) atau pengalangan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Jasa pengalangan hasil perikanan, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air
- Persebaran Serfikat Kelautan Perikanan
- Persebaran Serfikat Persebaran Distribusi Ikan
- Persebaran Serfikat Cara Pengalangan Ikan Yang Baik
- Persebaran Serfikat Cara Pembungkaman Ikan Yang Baik
- Persebaran Serfikat Cara Buati Daya Ikan Yang Baik
- Persebaran Serfikat Cara Pembuatan Pelakan Ikan Yang Baik
- Persebaran Serfikat Cara Pembuatan Otot Ikan Yang Baik
- Persebaran Serfikat Cara Distribusi Ikan Ikan Yang Baik

Data Responden

Waktu Survey: 19 Mar 2025 09:43

Nama:

Jenis Usaha: Perikanan Lainnya

Jenis Memon/Gender: Pria/Laki-laki Wanita/Perempuan

Umur: < 25 Tahun 25-40 Tahun 41-60 Tahun > 60 Tahun

Pendidikan: SD S1 SMP S2 SMA S3 D3

Religion: AGU Kristen/Sastra HINDU WISATA Non-KIP POKOK: Mahasarak

Pertanyaan

1. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu tentang **kesesuaian persyaratan** pelayanan yang harus dipenuhi dengan persyaratan pelayanan yang diinformasikan?
 Sangat sesuai
 Sesuai
 Kurang sesuai
 Tidak sesuai
2. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kemudahan prosedur** yang dijalan untuk mendapatkan layanan?
 Sangat Mudah
 Mudah
 Kurang mudah
 Tidak mudah
3. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kesesuaian jangka waktu penyelesaian** pelayanan dengan yang diinformasikan?
 Sangat sesuai
 Sesuai
 Kurang sesuai
 Tidak sesuai
4. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kesesuaian biaya** pelayanan yang dibayarkan dengan yang diinformasikan?
 Sangat sesuai
 Sesuai
 Kurang sesuai
 Tidak sesuai
5. Bagaimana pendapat Saudara tentang **kesesuaian produk** pelayanan antara yang ada pada publikasi dengan pelayanan yang diberikan?
 Sangat sesuai
 Sesuai
 Kurang sesuai
 Tidak sesuai
6. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kegiatan petugas pelayanan**?
 Sangat Cepat
 Cepat
 Kurang cepat
 Lambat
7. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **perilaku/kemampuan petugas pelayanan**?
 Sangat baik
 Baik
 Kurang baik
 Tidak baik
8. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **layanan konsultasi dan pengaduan** yang tersedia (sarana pengaduan/kemudahan mengadukan/indak lanjut)?
 Sangat baik
 Baik
 Kurang baik
 Tidak baik
9. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap **kegiatan dan ketersediaan sarana dan prasarana** pelayanan di unit?
 Sangat baik
 Baik
 Kurang baik
 Tidak baik

Kesimpulan

Apakah petugas telah memberikan pelayanan secara prima (sikap, kesempitn dan pncemplitn)?

Kritik dan Saran *) Harus diisi minimal 3 kata

Submit Form

© 2025 oleh Balai Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Indonesia

2. Hasil Pengolahan Data SKM

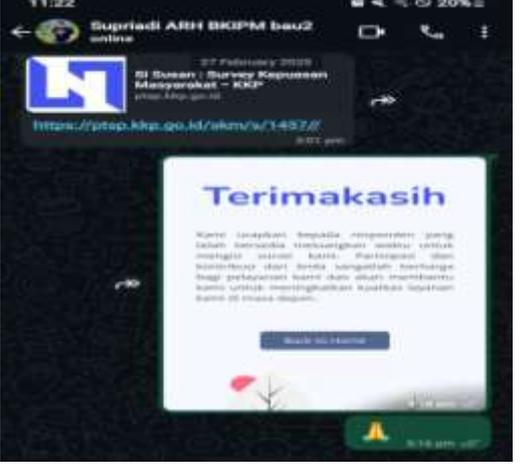
TABEL PERHITUNGAN DATA SURVEI KEPUJIAN MASYARAKAT (SKM)
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAUBAU
PERIODE TRIWULAN I 2025

NO	JENIS LAYANAN	JENIS KELAMIN	USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	NILAI UNSUR PELAYANAN									KRITIK DAN SARAN	NILAI PER JENIS LAYANAN	NRR PER JENIS LAYANAN
						U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9			
1	Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan	L	25-45	SMA	P.UMKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Terimakasih atas pelayanannya	100,00	94,29
2	Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan	L	25-45	SMA	P.UMKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Terimakasih atas pelayanan yang baik	100,00	
3	Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan	L	46-60	SMA	P.UMKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	sudah bagus pelayanannya	100,00	
4	Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan	L	25-45	SMA	P.UMKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan mantap sekali	100,00	
5	Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan	L	25-45	SMA	P.UMKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan sangat bagus	100,00	
6	Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan	L	46-60	SMA	P.UMKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan yang diberikan SKPM Baubau sangat bagus	100,00	
7	Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan	L	25-45	SMA	P.UMKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	tinggalan terus pelayanannya	100,00	
8	Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan	P	25-45	SMA	P.UMKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Terima kasih atas pelayanannya yang baik	100,00	
9	Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan	L	46-60	SMA	P.UMKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	pelayanannya sudah bagus	100,00	
10	Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan	L	46-60	SD	wirusaha	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Semoga kedepan bisa lebih baik lagi	72,22	
11	Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan	L	46-60	SMA	P.UMKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Layanan yang diberikan sudah sangat bagus	100,00	
12	Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan	L	25-45	SL	P.UMKP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Tinggalan terus pelayanan yang baik	75,00	
13	Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan	L	46-60	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Semoga sukses selalu	100,00	
14	Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan	L	25-45	SMA	P.UMKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Terimakasih pelayanan yang sangat baik	100,00	
15	Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan	L	25-45	SMA	P.UMKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan sangat memuaskan. Semoga kedepannya semakin maju	100,00	
16	Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan	L	46-60	SMA	P.UMKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Terima kasih atas pelayanan sepelav ig sangat baik dan memuaskan	100,00	
17	Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan	L	25-45	SMA	wirusaha	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Pelayanan sudah cukup baik dan lebih di tinggalkan lagi	75,00	
18	Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan	L	25-45	SMA	wirusaha	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Mantap mantap dan mantap	75,00	
19	Penjaminan Penerapan Program	L	46-60	SMA	wirusaha	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Pelayanan sudah baik, semoga terus dikembangkan	80,56	
20	Penjaminan Penerapan Program	L	25-45	SMA	P.UMKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan yang diberikan sejauh ini sangat baik. Semoga tetap konsisten dan lebih baik lagi	94,44	
21	Penjaminan Penerapan Program	L	25-45	SL	P.UMKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Semoga pelayanan tetap baik seperti saat ini.	100,00	
JUMLAH NILAI PER-UNSUR						79	79	79	79	78	76	78	80	80			
BATA-BATA PER-UNSUR						3,76	3,76	3,76	3,76	3,71	3,71	3,71	3,81	3,82			
NILAI INDEKS PER-UNSUR						0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,41	0,42	0,42			
NILAI INDEKS KEPUJIAN MASYARAKAT						93,92											
															SANGAT BAIK		92,98

NO	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	L	20	33%
		P	1	2%
2	Usia	Dibawah 18	0	0%
		19-45	13	62%
		46-60	6	10%
		61	0	0%
3	Pendidikan	SD	1	5%
		SMP	0	0%
		SMA	18	86%
		U1	0	0%
		U2	0	0%
		U3	2	10%
		U4	0	0%
		U5	0	0%
4	Pekerjaan	ASN	0	0%
		TNI/POLRI	0	0%
		P.UMKP	10	50%
		Swasta	1	5%
		Wiraswasta	4	19%
		Pelajar/Mahasiswa	0	0%
5	Jenis Layanan	UU, Peraturan, legal, laboratorium pengujian peternakan, ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan	0	0%
		Penyediaan sarana standar/ikan, acuan/standar proses	0	0%
		Inspeksi/pengujian mutu peternakan, ikan, karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta budidaya	0	0%
		Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu, Terpadu/Manajemen Analisis, and Control Central Point (PMMP/ MACCP)	0	0%
		Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) untuk pengangkutan dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia (K)	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Kelulusan Pengolahan	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik	18	86%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembentukan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik	0	0%

NO	UNSUR PELAYANAN	AKTUAL MASYARAKAT		
		INDEKS KONVERSI	MUTU	KINERJA
U1	Persyaratan	94,05	A	Sangat Baik
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	94,05	A	Sangat Baik
U3	Waktu Penyelesaian	94,05	A	Sangat Baik
U4	Biaya/Tarif	94,05	A	Sangat Baik
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	92,86	A	Sangat Baik
U6	Kompetensi Pelayanan	92,86	A	Sangat Baik
U7	Perilaku Pelaksana	92,86	A	Sangat Baik
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	95,24	A	Sangat Baik
U9	Sarana dan Prasarana	95,24	A	Sangat Baik
NO	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,000 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,6000 - 3,0640	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,5320	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,0000	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM

	<p>Survey Kepuasan Masyarakat Unit : Stasiun KIPM Bau-Bau Pemerintah Tertinggi Cara Penanganan Ikan Yang Baik</p> <p>Data Responden:</p> <p>Tgl. Survey: 19-Mar-2025 14:01</p> <p>Nama: <input type="text"/></p> <p>Jenis Usaha: <input checked="" type="radio"/> Perikanan <input type="radio"/> Lainnya</p> <p>Jenis Keterselamatan: <input type="radio"/> Perikanan <input checked="" type="radio"/> Perikanan</p> <p>Usia: <input type="radio"/> < 25 Tahun <input type="radio"/> 25-40 Tahun <input type="radio"/> > 40 Tahun</p> <p>Pendidikan: <input type="radio"/> SD <input type="radio"/> S1 <input type="radio"/> SMP <input type="radio"/> S2 <input type="radio"/> SMA <input type="radio"/> S3 <input type="radio"/> D3</p> <p>Pekerjaan: <input type="radio"/> ASN <input type="radio"/> Pegawai Swasta <input type="radio"/> TNI/Polri <input type="radio"/> Wiraswasta/UMK <input checked="" type="radio"/> Petani / Mekanisa</p>
	<p>Survey Kepuasan Masyarakat Unit : Stasiun KIPM Bau-Bau Perjanjian Partisipasi Program Manajemen Mutu Terpadu (PMPM) Analisis and Critical Control Point (PMMD) HAKCP</p> <p>Data Responden:</p> <p>Tgl. Survey: 19-Mar-2025 14:12</p> <p>Nama: <input type="text"/></p> <p>Jenis Usaha: <input type="radio"/> Perikanan <input type="radio"/> Lainnya</p> <p>Jenis Keterselamatan: <input type="radio"/> Perikanan <input checked="" type="radio"/> Perikanan</p> <p>Usia: <input type="radio"/> < 25 Tahun <input type="radio"/> 25-40 Tahun <input type="radio"/> > 40 Tahun</p> <p>Pendidikan: <input type="radio"/> SD <input type="radio"/> S1 <input type="radio"/> SMP <input type="radio"/> S2 <input type="radio"/> SMA <input type="radio"/> S3 <input type="radio"/> D3</p> <p>Pekerjaan: <input type="radio"/> ASN <input type="radio"/> Pegawai Swasta <input type="radio"/> TNI/Polri <input type="radio"/> Wiraswasta/UMK <input type="radio"/> Petani / Mekanisa</p>
	

4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya

Laporan Hasil Tindak Lanjut Pelaksanaan

Survei Kepuasan Masyarakat

Periode Triwulan IV Tahun 2024



**Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Baubau**

**Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan**

2025

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam laporannya, World Bank menjelaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat dicapai jika ekspektasi dan kebutuhan dari pengguna layanan diakomodir dalam proses penyediaan pelayanan. Hal ini juga sejalan dengan salah satu asas dari penyelenggaraan pelayanan publik yang tertulis dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu asas partisipatif. Asas partisipatif selanjutnya diatur dalam bab khusus Pengikutsertaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional telah merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instrumen tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk

mencapai berbagai tujuan tersebut, maka Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Baubau perlu menyusun rencana tindak lanjut dan laporan hasil tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar proses *continuous improvement* dalam proses layanan publik dapat dipastikan dan pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II

DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Baubau periode triwulan IV tahun 2024 menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode Triwulan IV Tahun 2024

No	Unsur	IKM	Mutu Layanan
1	Persyaratan	92.00	A
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	94.25	A
3	Waktu Penyelesaian	93.00	A
4	Biaya/Tarif	95.25	A
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	93.00	A
6	Kompetensi Pelaksana	92.00	A
7	Perilaku Pelaksana	93.00	A
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	94.25	A
9	Sarana dan Prasarana	90.75	A

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari 3 unsur

dengan nilai terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu (Triwulan I 2025)			Penanggung Jawab
			Januari	Februari	Maret	
1	U1 – Persyaratan	Melakukan asistensi secara personal kepada pengguna jasa tentang prosedur dan persyaratan dari masing-masing jenis layanan.		√		Tim Pelayanan Publik
2	U3 – Waktu Penyelesaian	Menampilkan waktu penyelesaian semua jenis layanan di ruang pelayanan, media sosial SKIPM Baubau, dan web sidatbuton.id	√			Tim Pelayanan Publik
3	U9 – Sarana dan Prasarana	Melakukan asistensi kepada pengguna jasa tentang penggunaan fitur layanan serta optimalisasi sarana prasarana layanan		√		Tim Pelayanan Publik

BAB III

REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Dokumentasi Kegiatan	Tantangan / Hambatan
1	Melakukan asistensi secara personal kepada pengguna jasa tentang prosedur dan persyaratan dari masing-masing jenis layanan.	Sudah	Memberikan penjelasan kepada pengguna jasa tentang prosedur dan persyaratan dari masing-masing jenis layanan		Tidak ada hambatan saat pelaksanaan
2	Menampilkan waktu penyelesaian semua jenis layanan di ruang pelayanan, media sosial SKIPM Baubau, dan web sidatbuton.id	Sudah	Melakukan publikasi prosedur layanan melalui media cetak banner dan media social SKIPM Baubau dan web sidatbuton.id		Tidak ada hambatan saat pelaksanaan

3	Melakukan asistensi kepada pengguna jasa tentang penggunaan fitur layanan serta optimalisasi sarana prasarana layanan	Sudah	Memberikan penjelasan kepada pengguna jasa tentang penggunaan fitur layanan		Tidak ada hambatan saat pelaksanaan
---	---	-------	---	---	-------------------------------------

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sekiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Baubau telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100% .
2. Guna memastikan RTL tetap terimplementasi, maka perlu disusun berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Strategi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut, dan mendorong diimplementasikannya RTL antara lain :

No	RTL	Strategi Penyelesaian	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Stakeholder Terkait
1	Sosialisasi secara daring /luring kepada pengguna jasa terkait produk spesifikasi jenis pelayanan	Pemberitahuan melalui grup WA pengguna jasa atau pemberitahuan secara personal melalui WA atau tatap muka terkait produk spesifikasi jenis pelayanan	<3 bulan	Tim pelayanan publik	Pengguna jasa lingkup Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Baubau
2	Publikasi waktu penyelesaian layanan melalui media cetak (banner, brosur, amflet dsb) dan media elektronik (media sosial, tiktok, grup WA dsb)	Pemberitahuan melalui grup WA pengguna jasa atau pemberitahuan secara personal melalui WA atau tatap muka terkait prosedur/waktu penyelesaian layanan	<3 bulan	Tim pelayanan publik	Pengguna jasa lingkup Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Baubau

3	Sosialisasi/ asistensi secara daring /luring kepada pengguna jasa terkait penggunaan sarana prasarana/fitur layanan	Pemberitahuan melalui grup WA pengguna jasa atau pemberitahuan secara personal melalui WA atau tatap muka terkait penggunaan sarana prasarana/fitur layanan	<3 bulan	Tim pelayanan publik	Pengguna jasa lingkup Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Baubau
---	---	---	----------	----------------------	--

Baubau, 08 April 2025

Kepala SKIPM Baubau



Yuni Irawati Wijaya, S.Pi, M.P

NIP. 196906091998032002